



Katalog BPS : 4601003.72

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN SULAWESI TENGAH

# 2014

<http://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**STATISTIK POLITIK  
DAN KEAMANAN  
SULAWESI TENGAH**

**2014**

<http://sulteng.bps.go.id>

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN SULAWESI TENGAH 2014

ISBN : 979 480 988 8

KATALOG BPS : 4601003.72

No. Publikasi : 72000.1420

Ukuran Buku : 18 cm x 24 cm

Jumlah Halaman : 42 + vii rumawi

Naskah :  
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :  
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :  
Percetakan Rio Palu

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

## KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013” merupakan publikasi ketiga yang menyajikan data atau informasi perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data dalam publikasi ini terbagi menjadi dua. Pertama statistik politik yang menggambarkan hasil pemilu/pilkada. Kedua statistik keamanan yang menggambarkan kejadian tindak pidana.

Data yang disajikan dihimpun dari kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antarwaktu dan antarwilayah dengan cakupan seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami publikasi ini tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna data, seperti para penyelenggara pemerintahan, peneliti, dan dunia usaha dalam rangka mencermati dinamika politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, Juli 2014

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Tengah,



Johanes De Britto Priyono, M.Sc  
NIP 195909161985011001

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENJELASAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	2
<b>BAB II METODOLOGI .....</b>	<b>3</b>
2.1. Ruang Lingkup .....	3
2.2. Sumber Data .....	3
2.3. Metode Pengumpulan Data.....	3
<b>BAB III KONSEP DAN DEFINISI .....</b>	<b>4</b>
3.1. Statistik Politik.....	4
3.2. Statistik Keamanan .....	7
<b>BAB IV STATISTIK POLITIK .....</b>	<b>10</b>
4.1. Pemilihan Kepala Daerah.....	10
4.2. Pemilu Legislatif 2009.....	17
4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	22
<b>BAB V STATISTIK KEAMANAN .....</b>	<b>28</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir .....	12
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada.....	13
Tabel 4.3 Jumlah Kandidat, Perolehan Suara Sah Calon Terpilih, dan Partai Pengusungnya dalam Pilkada .....	14
Tabel 4.4 Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jabatan Sebelumnya.....	15
Tabel 4.5 Persentase Perolehan Suara Calon Kepala Daerah Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2012 .....	16
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 .....	18
Tabel 4.7 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009.....	19
Tabel 4.8 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009.....	20
Tabel 4.9 Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Tahun 2013.....	23
Tabel 4.10 Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur Tahun 2013 ...	24
Tabel 4.11 Jumlah Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013	25
Tabel 4.12 Jumlah <i>Hearing</i> DPRD Tahun 2012 - 2013.....	26
Tabel 4.13 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Tahun 2013.....	27

Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 .....	29
Tabel 5.2	Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 .....	30
Tabel 5.3	Jumlah Pidana Kejahatan yang Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> ) Tahun 2011 - 2013 .....	31
Tabel 5.4	Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> ) Tahun 2011 - 2013 .....	32
Tabel 5.5	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) Tahun 2011 - 2013 .....	33
Tabel 5.6	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) per 1.000 penduduk Tahun 2011-2013 .....	34
Tabel 5.7	Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan Kejahatan Tahun 2011 - 2013 .....	35
Tabel 5.8	Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2012 - 2013 .....	36
Tabel 5.9	Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2012 - 2013 .....	38
Tabel 5.10	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 .....	40
Tabel 5.11	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013 .....	41
Tabel 5.12	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 .....	42

**BAB I**  
**PENJELASAN UMUM**

**1.1. Latar Belakang**

Seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dalam dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap.

Dinamika politik seringkali berimbas pada aspek lain, terutama bidang keamanan. Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan. Ini berarti diperlukan alat untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antarwaktu dan antarwilayah.

Badan Pusat Statistik berupaya memenuhi kebutuhan akan alat untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan. Kegiatan tersebut telah mulai dirintis sejak tahun 2008 dengan cakupan hanya terbatas sampai tingkat provinsi. Pada tahun 2010 cakupan diperluas hingga tingkat kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini diharapkan terkumpul data tentang situasi politik dan keamanan dan dapat memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik



dan keamanan antarwaktu dan antarwilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan bertujuan untuk:

- i. menghimpun data statistik politik dan keamanan,
- ii. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- iii. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antarwaktu dan antarwilayah.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Ruang Lingkup**

Pengumpulan data statistik politik dan keamanan tahun 2012 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Referensi waktu bagi data merujuk kepada kejadian dari Januari - Desember 2012. Namun demikian, ada pula data yang mengacu kepada kejadian satu atau dua tahun sebelumnya.

#### **2.2. Sumber Data**

Data statistik politik dan keamanan bersumber dari hasil kompilasi data di berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Instansi terkait di tingkat provinsi terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemerintah Daerah provinsi, Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi, dan Sekretariat DPRD Provinsi. Instansi terkait yang menjadi sumber data di tingkat kabupaten/kota terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Kepolisian Resort (Polres), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota.

#### **2.3. Metode Pengumpulan Data**

Data untuk menyusun statistik politik dan keamanan 2014 ini dikumpulkan melalui kompilasi data hasil registrasi/catatan instansi terkait. Pengumpulan data menggunakan dua jenis instrumen berupa rancangan (*dummy*) tabel dan kuesioner. Dari kedua jenis instrumen tersebut, BPS daerah bebas memilih instrumen mana yang dianggap paling sesuai untuk pengumpulan data.

**BAB III**  
**KONSEP DAN DEFINISI**

**3.1. Statistik Politik**

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan konsep dan definisi. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada. Berikut ini adalah konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini.

- a) **Pemerintahan daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b) **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) **Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e) **Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) **Penduduk** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- g) **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- h) **Pemilih** adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- i) **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.
- j) **Partai Politik Peserta Pemilu** adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu (Pasal 8, UU No.10

Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:

(1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik;
- b. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlah provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu orang atau 1/1.000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

**k) Golongan putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang

berhak memilih;

- l) **Partisipasi penduduk dalam pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

### **3.2. Statistik Keamanan**

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan :

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang)
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan hukum.

Adanya tindak pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan manusia
- Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- Melawan hukum (syarat materiil)

**B. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran**

- a. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- b. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah :
  - peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
  - dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
  - peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
  - peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
  - peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
  - peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**C. Pelaku Tindak Kriminalitas**

- a. Pelaku tindak kriminalitas adalah:
  - orang yang melakukan tindak kriminalitas.
  - orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
  - orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
  - orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
  - orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :

- anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari enam belas tahun.
- dewasa adalah orang yang berumur enam belas tahun dan lebih.
- umum adalah anak-anak dan dewasa.

c. **Tahanan** adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

d. **Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.



## **BAB IV**

### **STATISTIK POLITIK**

#### **4.1. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut kedaulatan politik benar-benar di tangan rakyat. Melalui pilkada yang dilakukan secara langsung, rakyat menentukan sendiri kepala daerah, bahkan yang bukan berasal dari partai politik (calon independen). Pilkada serentak mulai dikenal sejak diterbitkan UU no. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pencalonan diatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memperoleh kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara atau kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai diluar parlemen lokal tersebut.

Pada UU no. 12/2008 tentang perubahan kedua UU no. 32/2004 tentang pemerintahan daerah diakomodir peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada. Syarat untuk dapat mencalonkan harus mengumpulkan surat dukungan yang besarnya bervariasi antara 3 - 6,5 persen dari jumlah penduduk, bergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Tabel 4.1 menampilkan waktu pelaksanaan pilkada terakhir baik pemilihan bupati, walikota maupun gubernur. Pada tahun 2013 ada dua kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Di Pilkada Kabupaten Donggala dimenangkan oleh calon dari jalur Independen. Jumlah DPT dan suara sah ditampilkan pada Tabel

4.2, sementara banyaknya calon, perolehan suara, dan partai pengusung pemenang pada pilkada ditampilkan pada Tabel 4.3. Pada Tabel 4.4 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang kepala daerah terpilih. Hasil pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011 ditampilkan pada Tabel 4.5.

<http://sulteng.bps.go.id>

**Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir**

Kabupaten/Kota	Pilkada	
	Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan		6 Juli 2011
2. Banggai		6 April 2011
3. Morowali		12 November 2012
4. Poso		2 Juni 2010
5. Donggala		4 September 2013
6. Tolitoli		31 Agustus 2010
7. Buol		4 Juli 2012
8. Parigi Moutong		6 Juli 2013
9. Tojo Una-una		2 Juni 2010
10. Sigi		16 September 2010
11. Palu		4 Agustus 2010
<b>Sulawesi Tengah</b>	6 April 2011	

Sumber: KPUD

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada**

Kabupaten/ Kota	Pemilihan Gubernur		Pemilihan Bupati/Walikota	
	Terdaftar	Mengguna kan Hak Pilih	Terdaftar	Mengguna kan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	108.877	90.515	111.344	96.705
2. Banggai	241.560	177.647	241.560	178.578
3. Morowali	133.549	99.378	147.301	117.144
4. P o s o	142.856	104.272	142.770	117.528
5. Donggala	178.739	133.059	187.969	137.882
6. Tolitoli	145.878	90.515	146.220	94.014
7. B u o l	84.146	65.995	90.262	73.900
8. Parigi Moutong	276.745	204.551	291.857	229.790
9. Tojo Una-una	93.998	67.914	92.008	75.618
10. S i g i	149.296	112.042	147.713	113.500
11. P a l u	230.119	141.695	227.908	138.758
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>1.785.763</b>	<b>1.292.369</b>	<b>1.826.912</b>	<b>1.373.417</b>

Sumber: KPUD

**Tabel 4.3. Jumlah Kandidat, Perolehan Suara Sah Calon Terpilih, dan Partai Pengusungnya dalam Pilkada**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
		Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	3	39.242	40,57	Hanura, PKPB, PPRN, PKS, PNIM, PDP, PKP, PMB, Partai Patriot, Partai Republikan, PDS
2. Banggai	6	65.560	37,61	Partai Golkar, PDIP, PDS, Gerindra
3. Morowali	5	52.397	45,25	Partai Demokrat, PBB, PDS, Partai Buruh
4. Poso	4	45.119	38,76	Partai Demokrat
5. Donggala	8	76.916	55,87	Independen
6. Tolitoli	3	36.944	41,93	Partai Patriot, PPPI, Gerindra, PNBKI, Barnas, PBB, PKBI, Pakar Pangan, Partai Kedaulatan, PAN
7. Buol	4	36.468	43,35	PPP, Partai Hanura, PKB, Partai Demokrat, PKS, PDIP, Gerindra
8. Parigi Moutong	4	124.560	55,20	PKB, PKPB, Gerindra
9. Tojo Una-una	7	24.370	32,00	Golkar, PPP, PIS, Partai Republikan
10. Sigi	6	34.452	31,58	PBR, PDS, PDIP Partai Republikan
11. Palu	6	43.411	31,28	Golkar, PAN
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>5</b>	<b>694.299</b>	<b>54,43</b>	<b>Hanura, PPP, Patriot, Gerindra, PKPB, PDP</b>

Sumber: KPUD

**Tabel 4.4. Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jabatan Sebelumnya**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Banggai Kepulauan	Laki-laki	S-2	Wiraswasta
2. Banggai	Laki-laki	S-2	Pensiunan Anggota DPR
3. Morowali	Laki-laki	S-2	Bupati Morowali
4. P o s o	Laki-laki	S-2	Bupati Poso
5. Donggala	Laki-laki	S-1	Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah
6. Tolitoli	Laki-laki	S-2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-toli
7. B u o l	Laki-laki	S-2	Kepala RSUD Undata Palu
8. Parigi Moutong	Laki-laki	D-III	Bupati Parimo
9. Tojo Una-una	Laki-laki	S-1	Bupati Tojo Una-una
10. S i g i	Laki-laki	S-2	Kepala Dinas PU, Pertambangan, dan Energi Prov. Sulawesi Tengah
11. P a l u	Laki-laki	SMA	Walikota Palu
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>S-2</b>	<b>Bupati Parigi Moutong</b>

Sumber: KPUD

**Tabel 4.5. Persentase Perolehan Suara Calon Kepala Daerah Hasil Pemilihan Gubernur Tengah Sulawesi Tahun 2011**

Kabupaten/Kota	Nomor Urut Calon *)				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	8,25	3,93	66,77	15,77	5,27
2. Banggai	5,89	3,73	69,48	12,26	8,64
3. Morowali	13,15	12,89	50,13	7,24	16,59
4. P o s o	13,12	13,76	40,50	25,16	7,46
5. Donggala	36,72	6,22	35,85	15,92	5,29
6. Tolitoli	12,32	7,20	41,96	9,44	29,09
7. B u o l	51,23	2,16	36,79	2,75	7,07
8. Parigi Moutong	7,05	17,82	67,62	4,13	3,38
9. Tojo Una-una	21,35	9,80	38,14	23,30	7,41
10. S i g i	26,01	5,20	54,05	8,21	6,53
11. P a l u	8,46	10,03	64,40	9,59	7,52
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>16,18</b>	<b>9,06</b>	<b>54,43</b>	<b>11,62</b>	<b>8,71</b>

Sumber: KPUD

Keterangan \*):

1. Prof (Em) Drs. H Aminuddin Ponulele, MS. – DR. Hj. Luciana IS Baculu, SE. MM
2. H. Sahabudin Mustafa – H. Faisal Mahmud
3. Drs. H. Longki Djanggola, M.Si – H. Sudarto, SH. M.Hum
4. Ir. H. Rendy M. Affandi Lamadjido – H. Bandjela Paliudju
5. H. Achmad Yahya, SE. MM. - Drs. H. Moh. Ma’ruf Bantilan, MM

#### **4.2. Pemilu Legislatif 2009**

Untuk pertama kalinya, pada pemilu legislatif 2009 Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 9 April 2009 menghasilkan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah penduduk yang terdaftar sebesar 1.663.623 orang di Sulawesi Tengah, hanya sekitar 77,95 persen yang melaksanakan hak pilihnya atau 1.296.819 orang. Dari pemilih yang memberikan suara tersebut sebanyak 96.989 (7,48 persen) suara tidak sah. Partai Golongan Karya menjadi pemenang dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah perolehan suara sebanyak 242.130 suara (19,88 persen). Diikuti Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara 142.402 suara (11,69 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di urutan ketiga dengan perolehan suara 76.351 (6,27 persen).

Dari 38 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah semua mendapat suara. Namun hanya lima belas partai yang memperoleh kursi di DPRD. Partai Golongan Karya memperoleh kursi terbanyak sebanyak sembilan kursi, diikuti Partai Demokrat yang memperoleh enam kursi.



**Tabel 4.6. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009**

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009	
	Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	105.764	94.970
2. Banggai	208.560	162.550
3. Morowali	134.268	101.766
4. P o s o	131.120	108.883
5. Donggala	317.823	243.264
6. Tolitoli	141.750	109.377
7. B u o l	79.130	67.757
8. Parigi Moutong	265.102	206.948
9. Tojo Una-una	85.737	70.654
10. S i g i	-	-
11. P a l u	194.369	130.650
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>1.663.623</b>	<b>1.296.819</b>

Sumber: KPUD

Keterangan : Kab. Sigi masih bergabung dengan Kab. Donggala

**Tabel 4.7 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009**

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	87.189	7.781	10.353
2. Banggai	152.143	10.407	46.899
3. Morowali	98.077	3.689	31.965
4. P o s o	103.880	5.003	21.581
5. Donggala	224.054	19.210	73.058
6. Tolitoli	98.122	11.255	31.963
7. B u o l	60.779	6.978	11.373
8. Parigi Moutong	188.044	18.904	56.058
9. Tojo Una-una	65.214	5.440	14.203
10. S i g i	-	-	-
11. P a l u	122.328	8.322	64.421
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>1.199.830</b>	<b>96.989</b>	<b>361.874</b>

Sumber: KPUD

Keterangan : Kab. Sigi masih bergabung dengan Kab. Donggala

**Tabel 4.8. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009**

Partai Politik	Jumlah Perolehan	
	Suara	Kursi
(1)	(2)	(3)
1. Partai Hati Nurani Rakyat	59.425	3
2. Partai Karya Peduli Bangsa	45.009	2
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	11.627	-
4. Partai Peduli Rakyat Indonesia	28.627	-
5. Partai Gerakan Indonesia Raya	45.077	2
6. Partai Barisan Nasional	16.861	-
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	34.888	2
8. Partai Keadilan Sejahtera	58.947	4
9. Partai Amanat Nasional	66.810	4
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru	7.648	-
11. Partai Kedaulatan	10.141	-
12. Partai Persatuan Daerah	7.609	-
13. Partai Kebangkitan Bangsa	39.797	1
14. Partai Pemuda Indonesia	8.916	-
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	8.556	-
16. Partai Demokrasi Pembaruan	23.854	1
17. Partai Karya Perjuangan	9.042	-
18. Partai Matahari Bangsa	8.014	-
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.474	-
20. Partai Demokrasi Kebangsaan	10.397	-

Sumber: KPUD

**Lanjutan Tabel 4.8**

Partai Politik	Jumlah Perolehan	
	Suara	Kursi
(1)	(2)	(3)
21. Partai Republika Nusantara	13.694	-
22. Partai Pelopor	9.385	-
23. Partai Golongan Karya	242.130	9
24. Partai Persatuan Pembangunan	43.634	2
25. Partai Damai Sejahtera	60.288	3
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	4.234	-
27. Partai Bulan Bintang	26.994	-
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	76.351	4
29. Partai Bintang Reformasi	27.741	1
30. Partai Patriot	36.896	1
31. Partai Demokrat	142.403	6
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia	11.027	-
33. Partai Indonesia Sejahtera	5.233	-
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama	9.118	-
41. Partai Merdeka	1.034	-
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	166	-
43. Partai Serikat Indonesia	255	-
44. Partai Buruh	4.465	-

Sumber: KPUD

#### **4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada masa Orde Baru keanggotaan DPRD terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPRD hasil pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPRD yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. DPRD hasil pemilu 2004 berbeda dengan yang sebelumnya, seluruh anggota DPRD merupakan hasil pemilu.

Terdapat perbedaan mendasar pada pemilu 2009 terkait dengan model keterpilihan sebagai anggota DPRD. Calon anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada Daftar Calon Tetap (DPT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DPT memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi di Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan ditampilkan pada Tabel 4.9, Tabel 4.10, dan Tabel 4.11. Tabel 4.12 memuat jumlah *hearing* yang dilakukan oleh anggota DPRD selama tahun 2013. Sedangkan Tabel 4.13 menampilkan jumlah produk DPRD yang menggambarkan kinerja dari anggota DPRD.

**Tabel 4.9. Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	21	4	25
2. Banggai	29	6	35
3. Morowali	22	3	25
4. Poso	30	0	30
5. Donggala	23	6	29
6. Tolitoli	24	6	30
7. Bulukumba	20	5	25
8. Parigi Moutong	35	5	40
9. Tojo Una-una	24	1	25
10. Sigi	25	5	30
11. Palu	24	6	30
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>45</b>

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 4.10. Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	21 – 35	36 – 49	50 – 59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	3	14	5	3
2. Banggai	5	19	9	2
3. Morowali	3	14	8	0
4. Poso	0	23	2	5
5. Donggala	3	11	16	0
6. Tolitoli	2	18	7	3
7. Buol	2	14	8	1
8. Parigi Moutong	5	24	8	3
9. Tojo Una-una	3	15	3	4
10. Sigi	2	18	4	6
11. Palu	2	18	6	4
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>12</b>

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 4.11. Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Pendidikan Terakhir				
	< SLTA	SLTA	D1 - D3	S1	S2 - S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	-	8	-	12	5
2. Banggai	-	5	1	16	13
3. Morowali	-	7	-	18	-
4. Poso	-	7	-	17	6
5. Donggala	-	7	-	21	2
6. Tolitoli	-	15	-	13	2
7. Buol	-	8	2	11	4
8. Parigi Moutong	-	11	-	22	7
9. Tojo Una-una	-	11	1	13	0
10. Sigi	-	9	1	15	5
11. Palu	-	9	1	16	4
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>11</b>

Sumber: Sekretariat DPRD



**Tabel 4.12. Jumlah *Hearing* DPRD Tahun 2012 -2013**

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2012	2013
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	18	2
2. Banggai	73	53
3. Morowali	45	49
4. Poso	20	5
5. Donggala	41	62
6. Tolitoli	31	27
7. Buol	14	27
8. Parigi Moutong	17	28
9. Tojo Una-una	18	6
10. Sigi	28	22
11. Palu	13	14
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>51</b>	<b>-</b>

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 4.13. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Keputusan DPRD	Keputusan pimpinan DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	13	18	22
2. Banggai	11	16	1
3. Morowali	16	12	11
4. Poso	13	15	27
5. Donggala	8	26	13
6. Tolitoli	11	16	11
7. Buol	7	7	7
8. Parigi Moutong	-	14	99
9. Tojo Una-una	4	19	-
10. Sigi	14	23	13
11. Palu	8	21	9
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>39</b>

Sumber: Sekretariat DPRD

<http://sulteng.bps.go.id>

**BAB V**  
**STATISTIK KEAMANAN**

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi sepuluh kabupaten dan satu kota hampir semuanya telah memiliki kantor Kepolisian Resort (Polres) kecuali Kabupaten Sigi. Untuk pelayanan tingkat polres, warga Kabupaten Sigi masih dilayani oleh kantor Polres Donggala. Jumlah pos polisi terbanyak di Kabupaten Banggai sebanyak 16 pos polisi sedangkan kabupaten lain kisarannya 3-12 pos polisi.

Rasio penduduk per polisi yang ditampilkan pada Tabel 5.2 menggambarkan dengan jumlah polisi sebanyak 5.254 orang yang bertugas di Sulawesi Tengah, setiap satu orang polisi harus menangani 501 orang penduduk. Untuk tingkat polres, Kabupaten Parigi Moutong memiliki rasio penduduk per polisi paling tinggi di Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso memiliki rasio penduduk per polisi terendah.

Tabel 5.5 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*), selang waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak pidana semakin tinggi. Kota Palu memiliki intensitas tindak pidana yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah yang intensitas tindak pidananya paling rendah di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Tabel 5.1. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	1	7	12
2. Banggai	1	11	16
3. Morowali	1	11	3
4. Poso	1	12	4
5. Donggala	1	8	7
6. Tolitoli	1	10	5
7. Buol	1	5	6
8. Parigi Moutong	1	7	10
9. Tojo Una-una	1	6	8
10. Sigi	-	5	0
11. Palu	1	4	9
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>80</b>

Sumber :Polda Sulawesi Tengah

**Tabel 5.2. Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi		Rasio Penduduk per Polisi
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Banggai Kepulauan	301	0	597
2. Banggai	591	11	556
3. Morowali	429	3	265
4. P o s o	864	4	260
5. Donggala	499	2	581
6. Tolitoli	419	7	518
7. B u o l	346	7	404
8. Parigi Moutong	511	11	845
9. Tojo Una-una	391	1	367
10. S i g i	-	-	-
11. P a l u	903	23	385
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>5.254</b>	<b>69</b>	<b>501</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

**Tabel 5.3. Jumlah Pidana Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)  
Tahun 2011 - 2013**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	359	356	240
2. Banggai	1.498	1.702	1.326
3. Morowali	559	553	535
4. P o s o	463	571	395
5. Donggala	1.313	1.383	761
6. Tolitoli	442	481	282
7. B u o l	465	485	297
8. Parigi Moutong	904	944	812
9. Tojo Una-una	368	458	378
10. S i g i	-	-	-
11. P a l u	2.458	2.983	3.389
<b>Jumlah</b>	<b>8.829</b>	<b>9.916</b>	<b>8.415</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

**Tabel 5.4. Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)  
Tahun 2011 - 2013**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	113	97	37
2. Banggai	900	1240	861
3. Morowali	244	188	145
4. P o s o	255	297	173
5. Donggala	773	715	331
6. Tolitoli	306	289	120
7. B u o l	214	182	133
8. Parigi Moutong	379	441	353
9. Tojo Una-una	254	289	209
10. S i g i	-	-	-
11. P a l u	1.224	1.138	1.440
<b>Jumlah</b>	<b>4.798</b>	<b>4.876</b>	<b>3.802</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah



**Tabel 5.5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)  
Tahun 2011 - 2013**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	24 <sup>0</sup> 24'00 "	24 <sup>0</sup> 40'12"	36 <sup>0</sup> 15'36"
2. Banggai	05 <sup>0</sup> 50'24"	05 <sup>0</sup> 09'36"	06 <sup>0</sup> 41'24"
3. Morowali	15 <sup>0</sup> 40'12"	15 <sup>0</sup> 52'48"	17 <sup>0</sup> 01'00"
4. P o s o	18 <sup>0</sup> 55'12"	15 <sup>0</sup> 22'48"	22 <sup>0</sup> 31'12"
5. Donggala	06 <sup>0</sup> 40'12"	06 <sup>0</sup> 21'00"	12 <sup>0</sup> 10'48"
6. Tolitoli	82 <sup>0</sup> 34'12"	18 <sup>0</sup> 15'36"	31 <sup>0</sup> 17'24"
7. B u o l	18 <sup>0</sup> 49'48"	18 <sup>0</sup> 06'56"	29 <sup>0</sup> 35'24"
8. Parigi Moutong	09 <sup>0</sup> 41'24"	09 <sup>0</sup> 18'00"	11 <sup>0</sup> 05'00"
9. Tojo Una-una	23 <sup>0</sup> 48'00"	19 <sup>0</sup> 10'12"	24 <sup>0</sup> 16'12"
10. S i g i	-	-	-
11. P a l u	03 <sup>0</sup> 33'36"	02 <sup>0</sup> 54'24"	02 <sup>0</sup> 36'00"
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>00<sup>0</sup>57'00"</b>	<b>00<sup>0</sup>50'24"</b>	<b>01<sup>0</sup>04'00"</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Keterangan: <sup>0</sup> = jam  
' = menit  
" = detik

**Tabel 5.6. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 1.000 Penduduk Tahun 2011 - 2013**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	239	237	272
2. Banggai	454	516	529
3. Morowali	337	334	214
4. Poso	285	351	214
5. Donggala	238	251	160
6. Tolitoli	232	253	215
7. Buol	387	402	480
8. Parigi Moutong	257	268	248
9. Tojo Una-una	161	200	306
10. Sigi	-	-	-
11. Palu	850	1.032	1.140
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>362</b>	<b>407</b>	<b>317</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

**Tabel 5.7. Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan Kejahatan Tahun 2011 - 2013**

No.	Kasus	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kejahatan Konvensional	5.697	9.703	8.462
2.	Kejahatan Trans Nasional	16	5	-
3.	Kejahatan Merugikan Negara	38	-	114
4.	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi	-	3	55
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>5.751</b>	<b>9.711</b>	<b>8.528</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

**Tabel 5.8. Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2012 - 2013**

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana					
	Pembunuhan		Perkosaan		Penganiayaan Ringan	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	1	4	3	2	0	118
2. Banggai	3	0	12	6	13	387
3. Morowali	2	0	7	5	2	25
4. Poso	1	0	7	3	10	0
5. Donggala	1	2	0	6	78	87
6. Tolitoli	0	0	1	2	0	55
7. Buol	0	4	3	2	1	168
8. Parigi Moutong	8	2	5	3	46	213
9. Tojo Una-una	2	0	4	2	11	67
10. Sigi	-	-	-	-	-	-
11. Palu	5	2	11	7	9	419
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>170</b>	<b>1.539</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Lanjutan Tabel 5.8.

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana			
	Penganiayaan Berat		Penculikan	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Banggai Kepulauan	0	0	0	0
2. Banggai	7	0	0	0
3. Morowali	2	2	0	0
4. Poso	7	134	0	0
5. Donggala	29	28	0	0
6. Tolitoli	8	1	0	0
7. Buol	0	0	0	0
8. Parigi Moutong	14	3	0	3
9. Tojo Una-una	2	0	0	1
10. Sigi	-	-	-	-
11. Palu	3	565	0	0
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>67</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

**Tabel 5.9. Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	1	0	0	23	0
2. Banggai	3	50	69	29	16
3. Morowali	5	4	1	50	0
4. Poso	2	8	6	55	0
5. Donggala	1	7	85	52	0
6. Tolitoli	0	1	19	35	1
7. Buol	0	0	0	38	1
8. Parigi Moutong	9	13	45	130	13
9. Tojo Una-una	0	7	4	41	0
10. Sigi	-	-	-	-	-
11. Palu	0	131	565	0	105
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>21</b>	<b>221</b>	<b>794</b>	<b>453</b>	<b>136</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Keterangan :

- 1 Pembakaran dengan sengaja
- 2 Pengrusakan/Penghancuran barang
- 3 Pencurian dengan pemberatan
- 4 Pencurian ringan
- 5 Pencurian dengan kekerasan

Lanjutan Tabel 5.9.

Kabupaten/Kota (1)	Jenis Tindak Pidana				
	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (10)	10 (11)
1. Banggai Kepulauan	0	26	0	0	1
2. Banggai	3	157	0	31	125
3. Morowali	0	57	2	2	9
4. Poso	0	41	0	13	6
5. Donggala	2	64	0	1	21
6. Tolitoli	0	13	0	13	3
7. Buol	0	15	0	12	10
8. Parigi Moutong	3	62	0	18	10
9. Tojo Una-una	0	39	0	1	0
10. Sigi	-	-	-	-	-
11. Palu	3	215	4	529	491
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>11</b>	<b>689</b>	<b>6</b>	<b>620</b>	<b>676</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

Keterangan :

- 6 Pencurian dalam keluarga
- 7 Penipuan/Perbuatan curang
- 8 Penadahan
- 9 Pencurian kendaraan bermotor
- 10 Pencurian Lainnya

**Tabel 5.10. Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013**

No.	Jenis Tindak Pidana	2013
(1)	(2)	(3)
1.	Pencurian	824
2.	Pencurian dengan pemberatan	669
3.	Penganiayaan Biasa	524
4.	Penipuan	659
5.	Penggelapan	602
6.	Pengancaman	420
7.	Pencemaran nama baik	335
8.	Pengeroyokan	403
9.	Pemerasan dan Pengancaman	293
10.	Perbuatan tidak menyenangkan	240

Sumber: Polda Sulawesi Tengah



**Tabel 5.11. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-Anak	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	400	81	5	0
2. Banggai	793	993	23	22
3. Morowali	...	...	...	...
4. Poso	465	3	2	0
5. Donggala	316	37	10	0
6. Tolitoli	324	17	31	0
7. Buol	214	30	4	0
8. Parigi Moutong	660	176	23	10
9. Tojo Una-una	316	37	10	0
10. Sigi	-	-	-	-
11. Palu	55	9	43	0
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>3.543</b>	<b>1.383</b>	<b>151</b>	<b>32</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

**Tabel 5.12. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	WNI		WNA	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	405	81	0	0
2. Banggai	815	1.015	1	0
3. Morowali	...	...	...	...
4. P o s o	465	3	0	0
5. Donggala	326	37	0	0
6. Tolitoli	355	17	0	0
7. B u o l	218	30	0	0
8. Parigi Moutong	683	176	0	0
9. Tojo Una-una	326	37	0	0
10. S i g i	-	-	-	-
11. P a l u	98	9	0	0
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>3.691</b>	<b>1.495</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Sumber: Polda Sulawesi Tengah

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. MT. Haryono. No. 27, Palu Tlp. (0451)483611, 483613 Fax 483612

E-mail: [bps7200@bps.go.id](mailto:bps7200@bps.go.id), website: <http://sulteng.bps.go.id>